



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

Ika Henny Husnul Khotimah

NIM 130910201050

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

Ika Henny Husnul Khotimah

NIM 130910201050

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Ika Henny Husnul Khotimah

NIM 130910201050

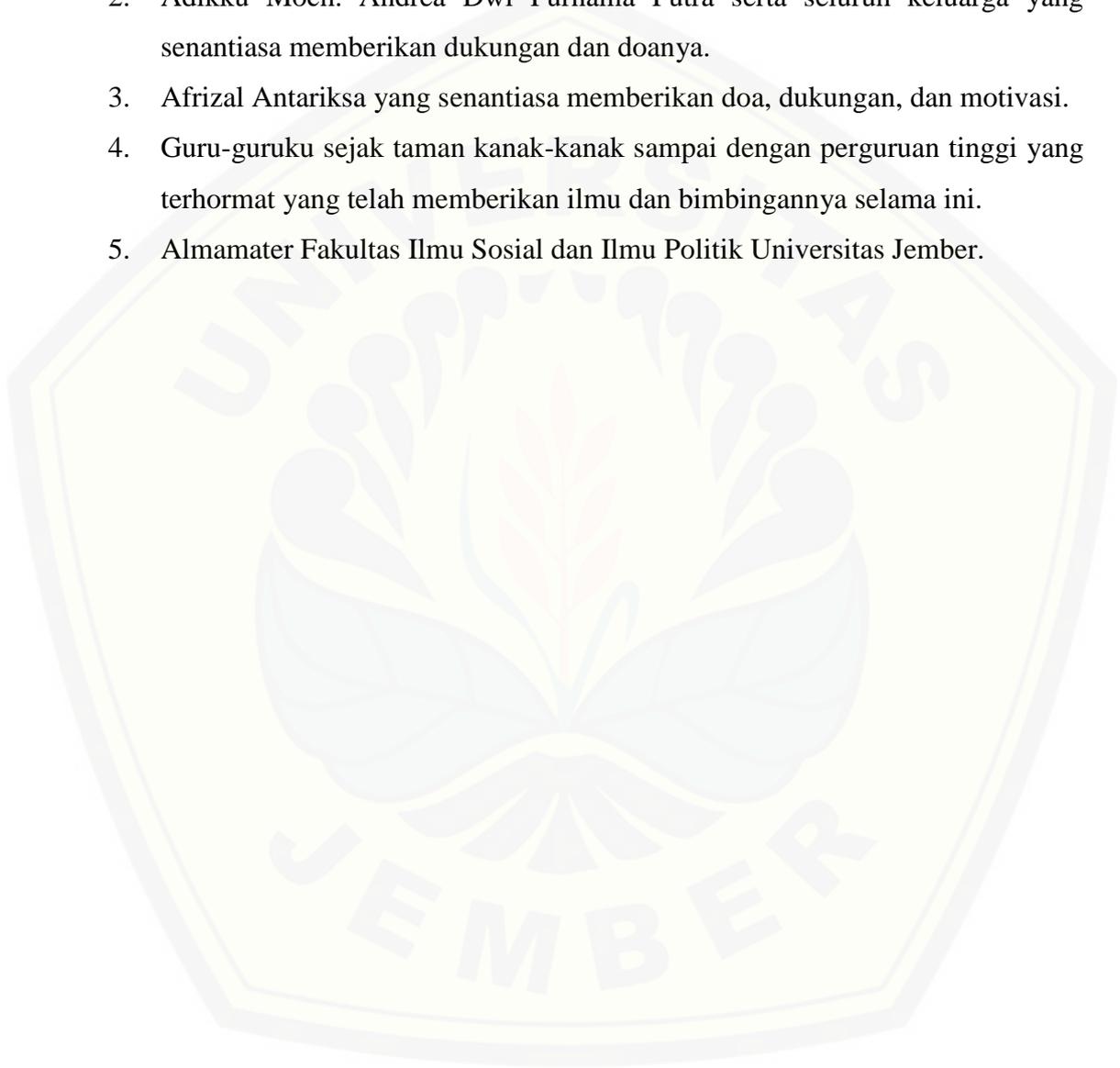
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Katipan dan Ibunda Umi Haniah yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dukungan moril dan materiil, serta doa yang selalu menyertai di setiap langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan.
2. Adikku Moch. Andrea Dwi Purnama Putra serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya.
3. Afrizal Antariksa yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama ini.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.

(Al-Ghazali)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Terjemahan surat Al-Insyirah:6-8)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ika Henny Husnul Khotimah

NIM : 130910201050

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Ika Henny Husnul Khotimah

NIM 130910201050

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

Ika Henny Husnul Khotimah

NIM 130910201050

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Nian Riawati S.Sos., MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi” karya Ika Henny Husnul Khotimah telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 09 November 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris/Pembimbing I,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Anggota Tim Penguji:

1. Tree Setiawan Pamungkas S.A.P., M.P.A
NIP. 199010032015041001 (.....)
2. Nian Riawati S.Sos., MPA
NIP. 198506092015042002 (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi; Ika Henny Husnul Khotimah; 130910201050, 2017: 130 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Potensi yang dimiliki Desa Jambewangi dalam berbagai bidang, mencakup pertanian, peternakan, wisata, dan industri kreatif menjadikan Desa Jambewangi sebagai salah satu desa wisata unggulan baru di Kabupaten Banyuwangi. Berbeda dengan daerah lain yang sektor wisatanya dikelola oleh investor, desa wisata di Kabupaten Banyuwangi harus digerakkan oleh desa itu sendiri. Oleh karena itu peran Pemerintah Desa sangat penting dalam pengembangan desa wisata.

Penelitian ini menggunakan konsep otonomi desa, pembangunan desa, peran pemerintah desa, pariwisata, dan pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan jenis tujuan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Serta di dukung data sekunder dari hasil dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Jambewangi, Sekertaris Desa Jambewangi, Kepala Bagian Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Jambewangi, Ketua Badan Usaha Milik Desa, Sekertaris Badan Usaha Milik Desa, Ketua Kelompok Kerja Pengurus Watu Gedhek, Ketua Kelompok Kerja Pengurus Lapak Kreatif, Ketua Kelompok Kerja Pengurus Jambewangi Jungle Lodge, masyarakat Desa Jambewangi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi. Teknik uji keabsahan data menggunakan peningkatan ketekunan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

yaitu 1) Sebagai Wirausaha, Pemerintah Desa memanfaatkan potensi Desa Jambewangi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, 2) Sebagai Koordinator, a. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata, b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tentang desa wisata, c. Implementasi bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk unit pengembangan usahanya yaitu desa wisata, 2) Sebagai Fasilitator, a. Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat dengan organisasi desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mitra Hutan Lestari dalam pengelolaan objek wisata, b. Penunjukan kelompok kerja pengurus wisata, c. Pembuatan Peraturan Desa Jambewangi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Pokdarwis” Desa Jambewangi 3) Sebagai Stimulator, a. Promosi pengenalan desa wisata melalui Festival Naga Berbunga, melakukan kegiatan pemerintahan di desa, dan melalui sosial media, b. Inovasi pengembangan destinasi wisata.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Jambewangi agar bantuan keuangan dari BUMDesa untuk unit wisata kedepannya dapat dialokasikan secara adil dan merata, sehingga mengurangi resiko kesenjangan pada destinasi wisata satu dengan lainnya. Menetapkan Surat Keputusan (SK) untuk Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing destinasi wisata agar kinerjanya dilindungi oleh landasan hukum. Merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagi masing-masing organisasi yang terlibat dalam pengembangan desa wisata sebagai landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi. Dan menyediakan informasi tentang destinasi wisata Desa Jambewangi sebagai promosi dengan memanfaatkan tempat yang sering dikunjungi masyarakat, seperti di Stasiun Kereta Api Kalisetail, di Kantor Desa Jambewangi maupun di tempat-tempat strategis lainnya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdiyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Nian Riawati S.Sos., MPA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Drs. Anwar, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Nian Riawati S.Sos., MPA., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
7. Bapak Mohammad Rofiq, selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
8. Bapak Suprayitno SE., selaku Kepala Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
9. Bapak Aris Widodo, selaku Sekretaris BUMDesa dan seluruh staf Pemerintah Desa Jambewangi Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

yang telah memberikan data, informasi, dan bantuan selama penulisan skripsi;

10. Bapak Chairul Anwar, Bapak Mismanto, Bapak Darselo, dan kelompok kerja wisata serta masyarakat Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
11. Ayahanda Katipan dan Ibunda Umi Haniah beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang dan segala bentuk dukungan, motivasi serta doa selama menempuh pendidikan di Universitas Jember sampai terselesaikannya skripsi ini;
12. Afrizal Antariksa yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabat SMP (Wilda, Elok, Diana, Novia, Yuni) yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini dapat segera terselesaikan;
14. Sahabat SMA (Widya, Peny, Elvi, Amanda, Shari) yang selalu mengingatkan untuk menyusun skripsi ini;
15. Sahabat (Tyas, Maya, Illoh, Venny) dan semua sahabat Kos Mauren yang telah menjadi keluarga baru di Jember;
16. Sahabat Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah berjuang bersama serta saling memberikan bantuan, dukungan dan motivasi;
17. Sahabat KKN 127 yang telah menjadi keluarga baru di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger;
18. Semua sahabat dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Desa.....	17
2.1.1 Desa.....	17
2.1.2 Otonomi Desa.....	19
2.2 Pembangunan Desa.....	20
2.3 Peran Pemerintah Desa.....	22
2.4 Pariwisata.....	27
2.4.1 Desa Wisata.....	32
2.5 Pengembangan Desa Wisata.....	35
2.6 Penelitian Terdahulu.....	44
2.7 Kerangka Konseptual.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	49
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Situasi Sosial.....	51
3.4 Desain Penelitian.....	51
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	57
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Jambewangi.....	60
4.2 Profil Desa Jambewangi.....	63
4.3 Stakeholder Pengembangan Desa Wisata Jambewangi.....	76
4.3.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	76
4.3.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.....	77
4.3.3 Kelompok Sadar Wisata Desa Jambewangi.....	78
4.4 Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Jambewangi.....	80
1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Wirausaha.....	82
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Koordinator.....	83
3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator.....	90
4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Stimulator.....	98

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....	113
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
-------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar Berdasarkan Data Potensi Desa 2014.....	2
1.2 Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Banyuwangi.....	5
1.3 Produk Domestik Bruto Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2011-2016....	7
1.4 Potensi Desa Jambewangi.....	9
1.5 Jumlah Kunjungan Wisata Desa Jambewangi.....	11
2.1 Komponen Pariwisata.....	29
2.2 Kajian Teori Komponen Desa Wisata.....	34
2.3 Pengembangan Desa Wisata.....	39
2.4 Penelitian Terdahulu.....	44
4.1 Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi.....	62
4.2 Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....	86
4.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Rangka Peningkatan Swadaya Masyarakat.....	87
4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambewangi Tahun Anggaran 2017.....	89
4.5 Laporan Keuangan BUMDesa Jambewangi Makmur.....	90
4.6 Paket Wisata Jambewangi Jungle Lodge.....	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Data Pengunjung Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Banyuwangi.....	4
2.1 Kerangka Konseptual.....	48
3.1 Uji Keabsahan Data.....	57
3.2 Komponen Analisis Data.....	58
4.1 Peta Desa Jambewangi.....	63
4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jambewangi.....	69
4.3 Objek Wisata Arboretum Bambu.....	70
4.4 Objek Wisata Situs Siwa Lingga Gumuk Payung.....	70
4.5 Objek Wisata Watu Gedhek.....	71
4.6 Objek Wisata Jambewangi Jungle Lodge.....	72
4.7 Objek Wisata Lapak Kreatif Pasar Jambewangi.....	72
4.8 Agrowisata Pertanian Buah Naga.....	73
4.9 Objek Wisata Gunung Raung.....	74
4.10 Objek Wisata Air Terjun Lider.....	75
4.11 Objek Wisata Bumi Perkemahan Sidomulyo.....	75
4.12 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016.....	81
4.13 Skema Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.....	83
4.14 Skema Pengelolaan Desa Wisata Jambewangi.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.....	117
2. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.....	118
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.....	119
4. Susunan Pengurus Kelompok Kerja Wisata Alam JIL (Jambewangi Jungle Lodge).....	120
5. Susunan Pengurus Kelompok Kerja Wisata Alam Watu Gedhek.....	121
6. Susunan Pengurus Kelompok Kerja Lapak Kreatif Pasar Jambewangi.	122
7. Proposal Bantuan Keuangan untuk Modal Pengembangan BUMDesa “Jambewangi Makmur”.....	123
8. Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mitra Hutan Lestari.....	130
9. Peraturan Desa Jambewangi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Jambewangi Tahun 2017.....	140
10. Peraturan Desa Jambewangi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	142
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Pokdarwis” Desa Jambewangi...	144
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata.....	149
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	166
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa..	168
15. Pedoman Wawancara.....	176

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
- b. Kewenangan lokal berskala desa,
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang biasanya disebut dengan otonomi desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Alasan tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan sehingga sebagian besar dari penduduknya tinggal di desa. Oleh karena itu desa merupakan faktor kekuatan utama sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Perhatian pemerintah terhadap desa dibuktikan dengan salah satu program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Berdasarkan data Potensi Desa Tahun 2014 di 511 kabupaten/kota, jumlah desa sebanyak 73.709 desa. Berdasarkan analisis potensi desa, dari jumlah desa tersebut pada tahun 2014 terdapat 36.838 atau 49.98% desa yang berstatus tertinggal dan 2.047 yang berstatus sangat tertinggal atau 2,78%. Sedangkan jumlah desa berkembang sebanyak 34,824. Jumlah desa tertinggal berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar
Berdasarkan Data Potensi Desa 2014**

No	Wilayah Pulau	Jumlah Desa	Jumlah Desa Tertinggal	%	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	%	Jumlah Desa Berkembang	%
1	Sumatera	23.005	4.231	61.9	910	4.0	7.864	34.2
2	Jawa	22.480	3.641	16.2	7	0.0	18.832	83.8
3	Kalimantan	6.580	4.013	61.0	163	2.5	2.404	36.5
4	Sulawesi	8.677	5.855	67.5	344	4.0	2.478	28.6
5	Nusa Tenggara & Bali	4.582	2.569	56.1	43	0.9	1.970	43.0
6	Maluku	2.116	1.392	65.8	71	3.4	653	30.9
7	Papua	6.296	5.137	81.9	509	8.1	623	9.9
Grand Total		73.709	36.838	50.0	2.047	2.8	34.824	47.2

(511 Kabupaten/Kota)

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 (diolah).

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa, pembangunan desa di pulau jawa lebih cepat dibandingkan dengan pulau lainnya. Hal ini juga membuktikan bahwa pulau jawa dapat memanfaatkan potensi desanya dengan baik. Adisasmita (2006:17-18) menyatakan bahwa, pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial budaya dan non spasial). Sehingga pembangunan pedesaan yang

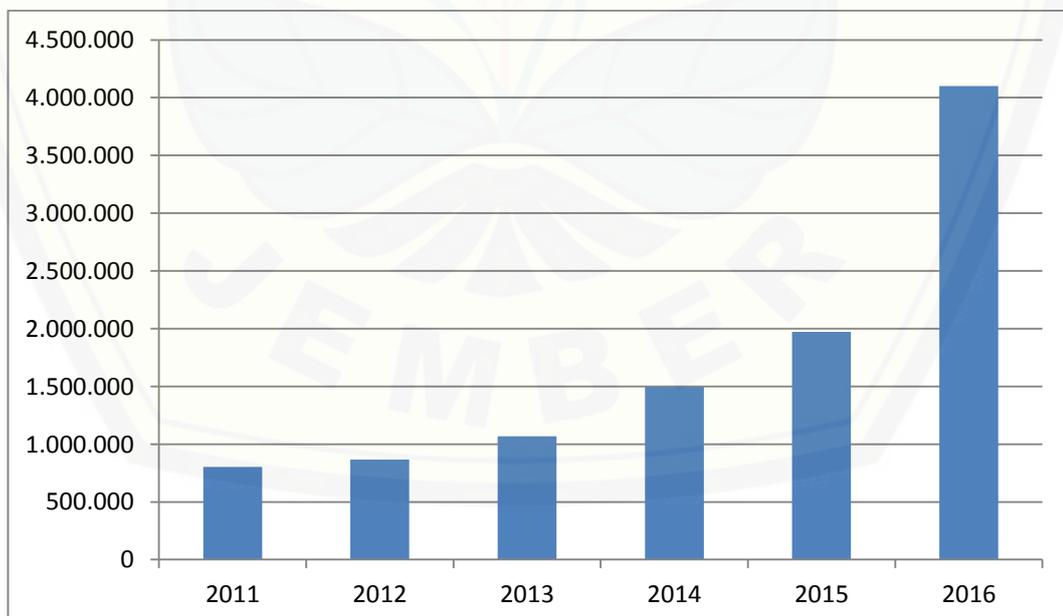
dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pembangunan desa maka suatu desa harus dapat mengembangkan potensi dan kelestarian alam yang ada di desa, maka perlu di sadari bahwa keberhasilan desa merupakan hasil partisipasi dari masyarakat dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat.

Banyaknya potensi desa di Indonesia yang belum muncul ke permukaan dapat menghambat pembangunan desa itu sendiri. Padahal jika potensi yang ada di desa-desa dapat dimanfaatkan, maka upaya membangun ekonomi desa akan lebih mudah dan cepat terlaksana. Potensi di daerah harus diperjelas sebab hal ini juga akan menjadi acuan dalam menjalankan program desa. Oleh karena itu potensi kekayaan alam dan budaya yang ada di desa sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dalam pembangunan tersebut pemerintah akan memfokuskan pada daerah pedesaan, dengan demikian akan terjadi perubahan sosial kemasyarakatan dari urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota akan pergi ke desa untuk berekreasi).

Pariwisata merupakan sektor utama prioritas pembangunan pada 2015-2019 selain infrastruktur, maritim, energi, dan pangan. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* (sektor unggulan) serta menetapkan target pariwisata tahun 2019 menjadi dua kali lipat yakni kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 15%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 275 juta, serta membuka 13 juta lapangan kerja. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Pariwisata telah mengembangkan 10 destinasi prioritas pariwisata sebagai Bali Baru yaitu Bandung (Jawa Barat), Great Bali, Great Jakarta, Great Kepri, Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), Coral Wonders (Wakatobi-Bunaken-Raja Ampat), Medan, Makassar, Lombok, dan Banyuwangi. (<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170616163301-307-222304/kemenpar-luncurkan-10-destinasi-wisata-branding/>).

Banyuwangi adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang sektor pariwisatanya telah berkembang pesat khususnya melalui pembangunan pariwisatanya. Banyuwangi menjadi kota transit para wisatawan yang ingin pergi ke Bali menggunakan jalur darat dan menyeberang di pelabuhan Ketapang. Namun mengingat Banyuwangi juga mempunyai potensi wisata yang tidak kalah menarik dengan daerah lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menjadikan kota tersebut sebagai tempat tujuan utama yang disinggahi oleh wisatawan sehingga tidak lagi sekedar digunakan sebagai kota transit saja. Banyuwangi yang dulu dikenal sebagai kota santet, namun dengan kerja keras dan upaya untuk merubahnya, kini Banyuwangi sudah dikenal wisatawan internasional sebagai kota wisata. Perubahan tersebut dihasilkan karena adanya strategi pembangunan, kemauan dan kerja keras serta dapat memanfaatkan segala potensi yang ada, mulai dari potensi alam, sosial-budaya dan tradisi, hingga potensi sumber daya manusia (SDM). Perkembangan pariwisata Banyuwangi dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata dalam grafik dibawah ini.

Gambar 1.1 Data Pengunjung Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (diolah).

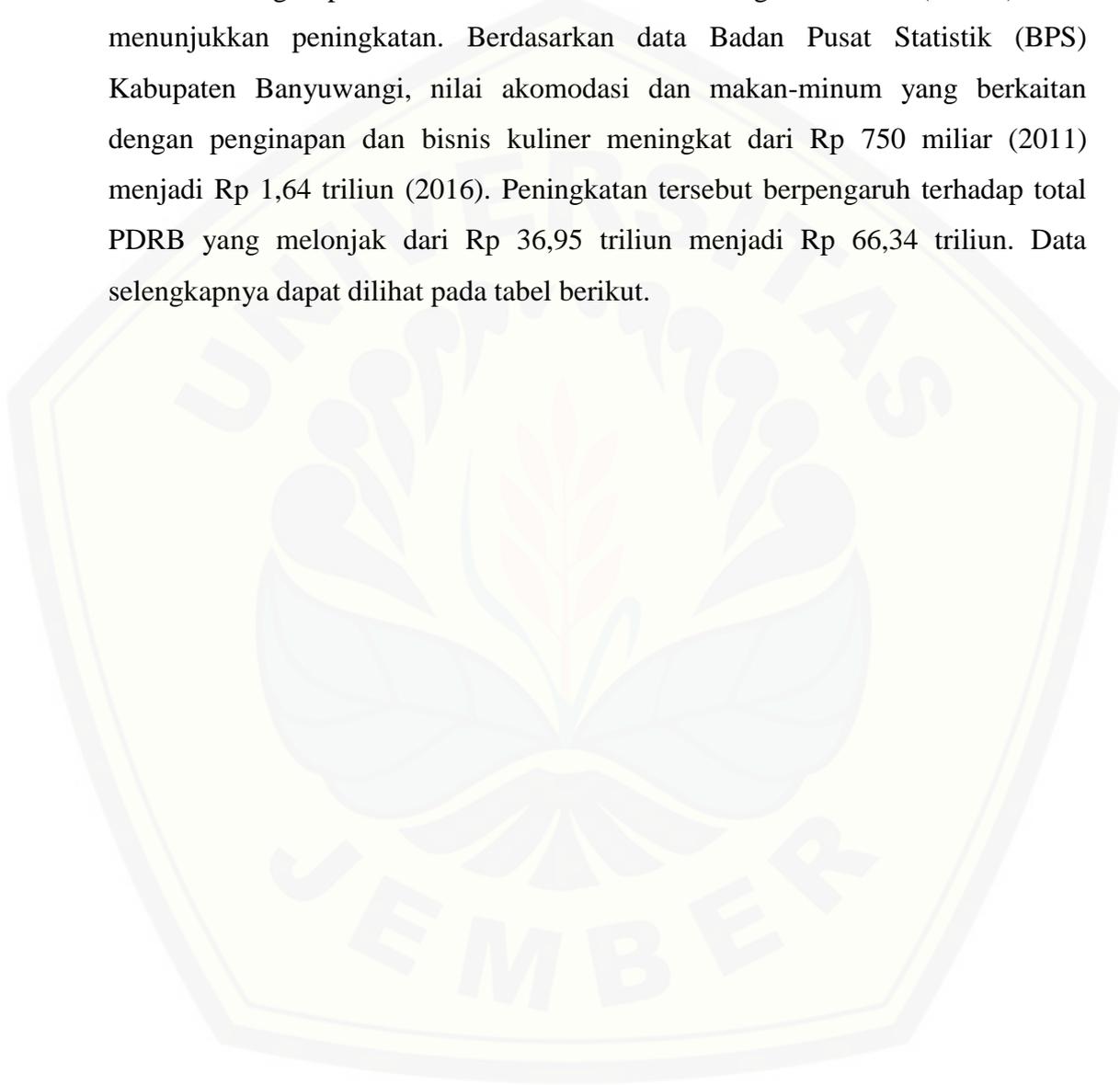
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi pada setiap tahun terus menunjukkan peningkatan. Bahkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup drastis, dari tahun 2015 berjumlah 1.972.393 pengunjung di tahun 2016 menjadi 4.099.588 pengunjung. Selain objek wisata, meningkatnya minat wisatawan di Banyuwangi didukung pula dengan adanya 72 event atau kegiatan dan atraksi wisata yang diselenggarakan di semua desa dan kecamatan di Banyuwangi. Selain meningkatnya jumlah wisatawan, objek wisata di Banyuwangi pun juga bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ini, menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah tercatat 34 objek dan daya tarik wisata di Banyuwangi antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.2 Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Banyuwangi

No	Objek dan Daya Tarik Wisata	No	Objek dan Daya Tarik Wisata
1	Alam Indah Lestari	18	Watu Dodol
2	Atlanta	19	Rowo Bayu
3	Desa Wisata Using	20	Wisata Waduk Sidodadi
4	Grajagan	21	Air Terjun Jagir
5	Gumuk Kantong Indah	22	Wisata Bom Marina
6	Bangsring Under Water	23	Pemandian Mendut Hijau
7	Kawah Ijen	24	X Badeng Adventure
8	Ekowisata Bedul	25	Pulau Merah
9	Makam Datuk Abd. Bauzir	26	Air Terjun Lider
10	Mirah Fantasi	27	Tamansari
11	Kalongan Indah	28	Rumah Pohon Pinus
12	Pancoran	29	Pantai Mustika Pancer
13	Pemandian Taman Suruh	30	Pantai Cacalan
14	Taman Nasional Alas Purwo	31	Telunjuk Raung
15	Taman Nasional Merubetiri	32	Timur Curah
16	Umbul Bening	33	Wisata Irjen
17	Umbul Pule	34	Antogan Indah

Sumber: Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata juga turut memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan sektor wisata juga menjadi pengungkit sektor lain seperti infrastruktur misalnya pembangunan dan perbaikan jalan dan industri kreatif seperti penginapan, kuliner, transportasi, oleh-oleh dan sebagainya. Sektor yang berkaitan dengan pariwisata di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, nilai akomodasi dan makan-minum yang berkaitan dengan penginapan dan bisnis kuliner meningkat dari Rp 750 miliar (2011) menjadi Rp 1,64 triliun (2016). Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap total PDRB yang melonjak dari Rp 36,95 triliun menjadi Rp 66,34 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2011-2016

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.839.484,0	15.062.530,2	17.159.477,0	19.371.046,4	21.944.161,6	23.476.850,6
Pertambangan dan Penggalian	3.476.373,5	3.614.143,0	3.702.999,1	4.251.243,2	4.650.842,9	5.048.739,6
Industri Pengolahan	4.337.109,5	4.798.231,4	5.285.691,9	5.852.153,2	6.549.448,4	7.229.620,0
Pengadaan Listrik dan Gas	19.018,5	19.592,6	19.931,1	22.525,4	25.576,8	28.832,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.929,0	28.645,1	31.631,4	33.492,0	36.944,2	40.484,5
Konstruksi	3.964.029,8	4.610.929,6	5.276.176,3	6.139.301,0	6.820.370,1	7.775.548,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.999.548,5	5.785.967,3	6.712.568,0	7.396.747,9	8.454.492,8	9.618.546,5
Transportasi dan Pergudangan	1.016.250,5	1.139.806,4	1.333.809,7	1.562.155,6	1.814.180,7	2.074.862,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	749.763,6	865.364,8	1.001.356,1	1.188.253,2	1.392.292,5	1.638.067,0
Informasi dan Komunikasi	1.632.481,0	1.809.217,6	1.992.422,6	2.162.474,9	2.413.780,5	2.676.775,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	612.112,7	711.098,0	828.486,6	933.437,4	1.055.224,1	1.180.434,2
Real Estate	535.841,0	583.575,0	650.061,7	776.123,3	895.733,6	971.945,9
Jasa Perusahaan	86.220,5	95.266,3	108.331,4	119.669,9	134.595,1	149.553,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	926.987,5	1.018.217,6	1.095.368,0	1.179.052,1	1.340.237,3	1.494.432,6
Jasa Pendidikan	1.156.712,9	1.362.774,1	1.502.501,6	1.648.684,9	1.813.156,0	1.978.775,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.979,8	137.525,1	150.544,9	170.025,3	189.245,3	217.677,6
Jasa lainnya	448.028,3	465.389,9	513.367,3	564.813,5	649.011,0	739.613,7
Produk Domestik Regional Bruto	36.950.870,6	42.108.273,8	47.364.724,7	53.371.199,3	60.179.292,9	66.340.758,9

Sumber: <https://banyuwangikab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/125>.

Semakin berkembangnya pariwisata di Banyuwangi, membuat pemerintah daerah mulai melakukan inovasi-inovasi baru salah satunya adalah mengembangkan pembangunan obyek dan daya tarik wisata yang berbasis potensi desa melalui wisata minat khusus atau wisata alternatif. Wisata minat khusus biasanya disebut juga dengan istilah desa wisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Pembangunan desa wisata bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif. Selain itu juga menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata. Tujuan lainnya yaitu memperluas lapangan kerja bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta meningkatkan pemasukan terhadap pendapatan asli desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata menjelaskan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat. Dalam Peraturan tersebut juga disebutkan bahwa desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Desa yang memiliki keunikan, otentitas adat dan keragaman budaya.
- b. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau leaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata yang berpotensi atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun temurun.
- d. Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Dari poin-poin tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggerakkan desa-desa yang memiliki potensi dan mempunyai keinginan untuk mengelola dan mengembangkannya menjadi desa wisata unggulan di Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan untuk menggali potensi yang bisa dikembangkan sehingga dapat membantu pembangunan sektor pariwisata Banyuwangi. Salah satu desa di Banyuwangi yang sedang merintis program pembangunan desa wisata adalah Desa Jambewangi yang berada di Kecamatan Sempu. Desa yang berada dibawah lereng kaki Gunung Raung ini sedang gencar-gencarnya menggali potensi lokal untuk merintis desa wisata berbasis budaya, alam, maupun ekonomi. Hal tersebut didukung dengan kekayaan alam dan kearifan lokal yang dimilikinya. Desa Jambewangi memiliki berbagai macam potensi yang dikelompokkan menjadi dua jenis potensi yaitu potensi ekonomi dan potensi wisata diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.4 Potensi Ekonomi dan Potensi Wisata Desa Jambewangi

Potensi Ekonomi	Potensi Wisata
Sentra Budidaya Buah Naga	Wisata Edukasi (Arboritum Bambu)
Sentra Peternakan Sapi dan Kambing	Wisata Religi (Situs Purbakala)
Sentra Peternakan Ayam Pedaging	Wisata Hutan (Watu Gedhek)
Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias	Wisata Adventure (River Tubing)
Budidaya Lele	Lapak Kreatif
Budidaya Jamur Emas	Outbond
Agro Hidroponik	Pemancingan
Pengrajin Alat Musik Hadrah	Home Stay
Usaha Kerajinan Kulit dan Sepatu	Jalur Pendaikan Gunung Raung
Sentra Hasil Hutan	Rest Area (Taman Keluarga)
Usaha Produksi Gula Merah	Bumi Perkemahan Sidomulyo
Produksi Buah Kering (Dried Food)	Air Terjun Lider
Produksi Susu Sapi dan Kambing	
Pengrajin Kopyah/Songkok	

Sumber: Site Plan Potensi Ekonomi dan Potensi Wisata Desa Jambewangi dikutip pada 28 Maret 2017 (diolah).

Banyaknya potensi yang dimiliki Desa Jambewangi dalam berbagai bidang, mencakup pertanian, peternakan, wisata, dan industri kreatif serta antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi membangun desa sangat besar, maka dari potensi-potensi yang beranekaragam tersebut Pemerintah Daerah bersama elemen masyarakat setempat menjadikan Desa Jambewangi sebagai salah satu desa wisata unggulan baru di Kabupaten Banyuwangi. Untuk mewujudkan sebuah desa wisata tentunya tidak akan terlepas dari campur tangan baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya sendiri. Sehingga diperlukan adanya kerjasama, perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan yang konsisten. Masyarakat dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersama-sama mengelola dan mengembangkan potensi yang ada semaksimal mungkin sehingga dapat menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan atau kegiatan wisata di Desa Jambewangi.

Sebagai promosi awal dan launching Desa Jambewangi sebagai desa wisata, pemerintah desa bersama masyarakat menyelenggarakan sebuah event yang diberi nama Festival Naga Berbunga. Festival ini diselenggarakan sebagai peringatan ulang tahun Desa Jambewangi sekaligus untuk memperkenalkan Desa Jambewangi sebagai desa wisata. Salah satu alasan mengangkat buah naga adalah buah naga merupakan salah satu hasil pertanian unggulan di Desa Jambewangi. Komoditas buah naga semakin melengkapi potensi pertanian yang selama ini menjadi mata pencaharian utama 24.000 penduduk Jambewangi. 500 sampai 600 hektare lahan pertanian yang ditanami buah naga mencoba dikembangkan menjadi salah satu produk andalan desa. Festival yang digagas oleh para pemuda-pemuda desa serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jambewangi ini tak semata mengangkat buah naga saja. Melalui festival tersebut masyarakat juga ingin mengangkat potensi desa yang lain guna diperkenalkan pada masyarakat luas, mulai dari berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kuliner, sampai tradisi dan budaya masyarakat setempat bahwa Desa Jambewangi memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko yang menghadiri acara tersebut merasa senang dengan antusiasme masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi desa masing-masing. Menurut Bapak Yusuf, jika geliat

masyarakat desa seperti Jambewangi semua dalam mengembangkan potensinya, saya optimistis Banyuwangi ke depan akan semakin maju. (<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ribuan-pengunjung-padati-festival-naga-berbunga>).

Melalui festival tersebut terbukti bahwa Desa Jambewangi bisa menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Sehingga pada 1 Januari 2017 diresmikan pembukaan beberapa obyek wisata diantaranya Wisata Watu Gedhek, Lapak Kreatif Pasar Jambewangi, dan Jambewangi Jungle Lodge. Sejak dibukanya obyek wisata tersebut, tercatat jumlah kunjungan wisata yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Jumlah Kunjungan Wisata Desa Jambewangi 2017

Objek Wisata	Jumlah Kunjungan (wisatawan)
Wisata Watu Gedhek	12.561
Lapak Kreatif	6.240
Jambewangi Jungle Lodge	10.688

Sumber: Data pengunjung pada masing-masing objek wisata.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata bahwa wisata di Desa Jambewangi cukup diminati oleh masyarakat. Meskipun belum lama diresmikan, tetapi antusiasme wisatawan terhadap obyek wisata tersebut bisa dikatakan cukup besar. Hal ini mendorong motivasi, kreasi, dan inovasi pemerintah desa bersama masyarakat untuk lebih memaksimalkan sarana maupun prasarana yang terdapat dalam obyek wisata tersebut. Dalam pengembangan desa wisata ini memang tidak bisa terlepas dari campur tangan masyarakat, oleh karena itu diharapkan dengan adanya program desa wisata ini dapat menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan tidak lagi sebagai obyek pembangunan. Masyarakat desa diberi ruang untuk berpartisipasi terhadap jalannya pengembangan desa wisata melalui organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Bab VI Pasal 11 Tentang Desa Wisata, organisasi pengelolaan desa wisata antara

lain sebagai berikut.

- (1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
- (6) Pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan desa wisata. Pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata ini juga diharapkan upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pengembangan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat

pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggungjawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Oleh karena itu peran Pemerintah Desa sangat penting terutama dalam meningkatkan serta mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mendorong jalannya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Peran tersebut didapatkan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Hak Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Bab VIII Pasal 14, Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 18, Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata,
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa,
- c. menegakkan peraturan perundang-undangan,
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa,
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa,
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa,
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemsayarakatan dalam bidang

kepariwisataan desa,

- i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

Dari poin-poin diatas dapat dikatakan bahwa pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu masyarakat desa diposisikan sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tanpa adanya kerjasama, kesatuan tujuan dan persepsi antar warga, serta warga bersama organisasi desa maupun institusi pemerintah desa maka dalam pengembangan desa wisata tidak akan pernah tercapai. Pada dasarnya Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dan diharapkan mampu menjadi garda terdepan di dalam mensukseskan program pembangunan khususnya pengembangan desa wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Melakukan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah/mencari solusi. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka perlu pemahaman terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya masalah itu. Masalah merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Atau dapat digambarkan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Menurut Ilmu Biologi masalah merupakan suatu pengertian atau makna yang belum kita pahami tentang mengapa gejala benda dan gejala peristiwa di alam ini ada dan bisa terjadi atau mengalami proses serta mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu setiap

penelitian yang dilakukan harus menemukan sebuah masalah yang harus diteliti dan dipecahkan.

Berdasarkan pengertian mengenai masalah di atas dan digabungkan dengan latar belakang yang dibuat oleh peneliti mengenai potensi-potensi yang dimiliki seperti wilayah yang luas, perkebunan, dan peternakan yang dikelola dengan baik, serta kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi dan pelaksanaan program desa wisata di Desa Jambewangi. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai “bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, dan sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian adalah menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian di atas, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya yaitu mendiskripsikan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memecahkan rumusan masalah secara tepat dan akurat. Sehingga manfaat penelitian dapat diartikan sebagai dampak dari pencapaiannya tujuan karena dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian mengandung dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu penelitian. Sedangkan manfaat praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari penelitian.

Dari definisi-definisi mengenai manfaat penelitian di atas, maka peneliti merumuskan manfaat penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut.

a. Manfaat teoritis bagi kepentingan ilmu pengetahuan

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi serta menjadi sarana dan hasil nyata pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh bagi peneliti.

b. Manfaat praktis bagi pemerintah

Manfaat praktis yang diharapkan bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sanjaya (2013:205), tinjauan pustaka adalah proses kegiatan menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku atau dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang terkait dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan konsep dapat diartikan sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu. Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Setyawan (2013:8) menjelaskan bahwa, konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep pada realita, maka semakin mudah pula konsep tersebut diukur dan diartikan. Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata yaitu sebagai berikut:

- a. otonomi desa,
- b. pembangunan desa,
- c. peran pemerintah desa,
- d. pariwisata,
- e. pengembangan desa wisata.

2.1 Otonomi Desa

2.1.1 Desa

Menurut Jamaludin (2015:4) desa diartikan sebagai berikut.

“Dari persepektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.”

Berbeda dengan beberapa pengertian desa diatas, Nurcholis (2011:2) menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup begotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sedangkan menurut Widjaja (2003:3), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19, kewenangan yang dimiliki desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
- b. Kewenangan lokal berskala desa,
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemreintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemreintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tersebut diatur dan diurus oleh desa. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pengembangan desa wisata ini termasuk dalam kewenangan lokal berskala desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dimaksud kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa selanjutnya pada Pasal 7 meliputi:

- a. bidang pemerintahan desa,
- b. pembangunan desa,
- c. kemasyarakatan desa, dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam bidang pemerintahan desa salah satu kewenangan yang tercantum di dalamnya adalah pendataan potensi desa. Sedangkan dalam pembangunan desa, salah satu kewenangan lokal berskala desa yang tercantum pada Pasal 9 adalah pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Selanjutnya pada Pasal 12, kewenangan lokal berskala desa di bidang ekonomi lokal desa salah satunya adalah pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota. Kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. Pada Pasal 2 disebutkan salah satu urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa adalah bidang pariwisata.

2.1.2 Otonomi Desa

Tim Lopera (2000:166) menyatakan bahwa, otonomi merupakan produk dari proses reformasi dan sekaligus momentum tumbangnya rezim orde baru yang pada dasarnya menawarkan perubahan penting. Perubahan yang dimaksud adalah mengubah skema sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi) dan mengubah pendekatan *top-down* menjadi *bottom-up*. Sedangkan menurut Soemantri (2014:13), otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan pengertian sebelumnya, Juliantara (2000:viii) menjelaskan otonomi sebagai bagian dari proses besar demokratisasi, sehingga suatu otonomi bukan final melainkan langkah awal.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan landasan normatif dalam pelaksanaan otonomi desa. Juliantara (2001:116) menyatakan bahwa, otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam memaknai kata otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran menurut Saragi (2004:7), aliran pemikiran yang pertama memaknai kata otonomi asli sebagai otonomi adat. Artinya desa tidak punya otonomi kecuali hal-hal yang menyangkut adat. Sementara aliran pemikiran kedua memaknai otonomi asli bukan adat tetapi sebagai otonomi yang diberikan. Otonomi yang diberikan mengandung arti ada yang memberikan dan ada pihak yang menerima pemberian tersebut. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa, otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab.

2.2 Pembangunan Desa

Studi pembangunan menurut Hettm (dalam Ngusmanto 2015:24), dianggap sebagai studi yang berorientasi pada masalah, bersifat terapan dan lintas ilmu, yang menganalisis perubahan masyarakat dalam konteks dunia, namun tetap memperhatikan kekhasan berbagai masyarakat dalam hal sejarah, ekologi, kebudayaan dan sebagainya. Sedangkan Januar (2006:21) menyatakan bahwa, pembangunan dapat disebutkan sebagai keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pengertian tersebut menempatkan pembangunan dalam posisi yang dinamis. Maksudnya, kondisi tersebut tidak berada sebagai sesuatu yang tetap,

tetapi berada dalam posisi yang selalu berubah secara terus-menerus. Selanjutnya Damsar dan Indrayani (2016:207), menjelaskan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan.

Setelah memahami konsep pembangunan, yang selanjutnya adalah konsep pembangunan desa. Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik, pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralistik dengan sistem desentralistik dalam sistem pemerintahan maupun sistem pembangunan. Sesuai dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang tertantum dalam poin ketiga program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, maka pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok sehingga akan lebih dipusatkan dan berawal dari tingkat paling bawah yaitu desa. (<https://news.detik.com/berita/3459960/nawacita-jokowi-jk-membangun-indonesia-dari-perbatasan>).

Damsar dan Indrayani (2016:211) menyatakan bahwa, pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan yang sengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat desa secara keseluruhan. Pembangunan desa meliputi seluruh aspek holistik komprehensif meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Pengertian pembangunan desa selanjutnya dikemukakan oleh Adisasmita (2006:3) yaitu sebagai berikut.

“Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 78 dijelaskan bahwa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari konsep pembangunan desa ini dapat dikatakan bahwa, pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan, dalam arti pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut, terutama yang berkaitan dengan potensi manusia dan daya dukungnya sehingga tujuan dasar dan tujuan dari pembangunan desa dapat tercapai. Tujuan dasar pembangunan desa yaitu mengurangi dan menghapuskan kemiskinan yang brekepanjangan, sedangkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan nasional bangsa Indonesia.

2.3 Peran Pemerintah Desa

Untuk memahami tentang peran pemerintah desa, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah konsepsi mengenai peran dan pemerintah desa. Konsep peran sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto (2012:212) yaitu, peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, berarti dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Basrowi (2005:63), keberadaan peran selalu melekat dengan adanya kedudukan. Artinya, tak akan ada peran tanpa adanya kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peran. Peran akan mengatur perilaku seseorang, juga menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain dalam batas-batas tertentu sehingga orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Levinson (dalam Herabudin 2015:143) menyatakan bahwa, peran mencakup tiga hal sebagai berikut.

- a. Norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Pemerintahan Desa. Nurcholis (2011:75) menyatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya Jamaludin (2015:110) menyatakan bahwa, pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa.

Menurut Nurcholis (2011:75), pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jika Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah, maka berbeda dengan BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa menurut Rivai (dalam Jamaludin 2015:111), merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok masyarakat. Secara operasional fungsi tersebut dapat dibedakan dalam fungsi pokok sebagai berikut.

1. *Intruktif*. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. *Konsultatif*. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinya.
3. *Partisipasi*. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Partisipasi ini tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
4. *Delegasi*. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
5. *Pengendalian*. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan

bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian tentang peran dan pemerintahan desa tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah desa adalah segala urusan yang dapat dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa yang membantu dalam menjalankan fungsi, tanggungjawab, dan kewajibannya menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang diperoleh dari kewenangan desa. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat penting terutama dalam meningkatkan serta mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mendorong jalannya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengembangan desa wisata, peran Pemerintah Desa didapatkan dari hak dan kewajiban yang dimiliki. Hak Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Bab VIII Pasal 14, Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 18, Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata,
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa,
- c. menegakkan peraturan perundang-undangan,
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa,
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa,
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa,
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemsayarakatan dalam bidang kepariwisataan desa,
- i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

Dari hak dan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Desa mempunyai peran dalam pengembangan desa wisata. Menurut Blakely (dalam Kuncoro 2004:113-114), peran-peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah Desa dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh Pemerintah Desa untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan- tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

2. Koordinator

Pemerintah Desa dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

3. Fasilitator

Pemerintah Desa dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

4. Stimulator

Pemerintah Desa dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha. Dalam bidang kepariwisataan Pemerintah Desa juga dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

2.4 Pariwisata

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Suwanto (1997:3) menyatakan bahwa, pariwisata adalah suatu kegiatan bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Selanjutnya Yoeti (dalam Suryadana dan Octavia 2015:30) menyatakan bahwa, istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain.

Wardiyanta (2006:49-50) menyatakan bahwa pariwisata memiliki dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansial. Dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sedangkan sebagai sebuah substansi, pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki.

Beberapa literatur memuat berbagai macam komponen pariwisata, namun ada komponen yang selalu ada dan merupakan komponen dasar wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berpengaruh. Para pakar pariwisata mempunyai pandangan yang berbeda mengenai komponen dasar pariwisata, namun ada beberapa bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya persamaan komponen dasar dalam pariwisata menurut para ahli dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.1 Komponen Pariwisata

Komponen Pariwisata	Inskeep (1991)	Gunn (1995)	Mc. Intosh (1995)	Pendit (1998)
Atraksi Wisata	<p>Atraksi wisata yang mencakup wisata alam, budaya, dan atraksi lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alam: iklim, pemandangan indah, laut dan pantai, flora dan fauna, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung. • Budaya: arkeologi, sejarah dan tempat-tempat budaya, pola budaya yang khas, seni dan kerajinan tangan, daya tarik aktifitas ekonomi, daya tarik perotokoan, museum dan fasilitas budaya lainnya, festival budaya, ramah tamah kenegaraan. • Khusus: Taman nasional, taman hiburan, sirkus, shopping, pertemuan, konvensi dan konvensi, even-even khusus, gambling. 	<p>Atraksi/daya tarik wisata dikategorikan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya alam meliputi: air mancur, kolam, sungai. • Sumber daya dan budaya meliputi: arkeologi, sejarah, perdagangan, hiburan, kesehatan, keagamaan, dan olahraga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya alam meliputi: iklim, bentuk alam, flora, fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, dan lain sebagainya. • Budaya buatan meliputi: seni, sejarah, musik, tarian, drama, festival, pameran, pertunjukan, pariwisata spesial, museum, <i>art gallery</i>, shopping, dan olahraga. 	<p>Atraksi, merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Atraksi ini meliputi panorama keindahan alam, gunung, lembah, ngarai, gua, danau, air terjun, pantai, iklim, dan lain sebagainya.</p>
Fasilitas Wisata	Akomodasi, tempat makan dan minum, tempat belanja, aksesibilitas dan fasilitas umum.	Akomodasi, tempat makan dan minum, tempat belanja, aksesibilitas.	Hotel, motel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan.	Akomodasi, restoran, toko pakaian/batik, souvenir shop, dan fasilitas umum.
Transportasi	Transportasi darat, laut, dan udara.	Transportasi udara, mobil, kereta kuda, kereta listrik, rel kereta api, pelabuhan, dan lain sebagainya.	Transportasi meliputi: kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, dan fasilitas transportasi lainnya.	Jalan yang baik, lalu lintas lancar, alat yang cepat.

Komponen Pariwisata	Inskeep (1991)	Gunn (1995)	Mc. Intosh (1995)	Pendit (1998)
Infrastruktur	Telepon, faksimail, telex, air bersih, sistem pembuangan air kotor dan sistem pembuangan sampah	Air bersih, pembuangan limbah, keamanan, listrik, dan pemadam kebakaran.	Jaringan air bersih, air limbah, gas, listrik, telepon, drainase, jalan raya, rel kereta api, bandara, stasiun kereta api, terminal, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan, dan infrastruktur lainnya.	Pendit tidak memasukkan prasarana lingkungan sebagai bagian dari komponen pariwisata.
Kebijakan Pemerintah	Elemen institusi yang terkait dengan pengembangan pariwisata.	Gunn tidak menjadikan kebijakan sebagai bagian dari komponen pariwisata, namun kebijakan ini lebih pada informasi dan promosi pariwisata.	Aturan mengenai guna lahan atau zoning., pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menunjang pariwisata, upaya promosi dalam tingkat yang lebih luas atau lebih besar.	Politik pemerintah, yaitu sikap pemerintah dalam menerima kunjungan wisatawan ke negaranya. Unsur terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu politik pemerintah yang langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara tersebut, dan politik pemerintah tidak langsung, yaitu keadaan atau kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata.

Sumber: Suryadana dan Octavia (2015:37-38), diolah.

Setelah berbagai komponen pariwisata terpenuhi, pariwisata tentu tidak akan terlepas dari pelaku pariwisata. Damanik dan Weber (2006:19) menyebutkan beberapa pelaku pariwisata, antara lain sebagai berikut.

1. Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata.

2. Industri Pariwisata

Industri pariwisata adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

- a. pelaku langsung, yaitu usaha-usaha yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan.
- b. pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata misalnya kerajinan tangan, panduan wisata, dsb.

3. Pendukung Jasa Wisata

Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk ini.

4. Pemerintah

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

5. Masyarakat Lokal

Penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak LSM, baik lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata. bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non pemerintah ini sudah melakukan aktvitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.

2.4.1 Desa Wisata

Daya tarik wisata menjadi komponen utama dan sangat penting dalam pariwisata karena merupakan segala sesuatu yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Suryadani dan Octavia (2015:520), daya tarik wisata dibedakan menjadi tiga, antara lain:

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu:

- a. flora dan fauna,
- b. keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya pantai dan hutan bakau,
- c. gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun, dan danau,
- d. budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan.

2. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Daya tarik wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi meseum, peninggalan sejarah, upacara adat, serta pertunjukan dan kerajinan.

3. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Daya tarik wisata minat khusus merupakan jenis wisata baru yang dikembangkan di Indonesia, wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Contohnya berburu, mendaki gunung, arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata, dll.

Dalam perkembangannya, para wisatawan mulai menggemari tempat wisata yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan alamnya saja tetapi lebih kepada interaksi masyarakatnya. Oleh karena itu mulai semakin berkembang jenis wisata minat khusus atau wisata alternatif. Simanungkalit (Ed., h.3) menyatakan bahwa, wisata minat khusus adalah bentuk wisata dimana wisatawan memiliki bekal berupa keahlian dan ilmu pengetahuan atas daya tarik wisata pada destinasi pariwisata yang dikunjunginya. Wisata minat khusus biasanya disebut juga dengan istilah desa wisata. Desa wisata ini bertujuan untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Sedangkan menurut program Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dibuat oleh Departemen Pariwisata menjelaskan pengertian desa wisata sebagai berikut.

“Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.” (Priasukmana dan Mulyadin 2001).

Selanjutnya menurut Inskeep (1991), desa wisata adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional. Biasanya di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Maksud dari pengertian tersebut adalah desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Berbeda dengan pengertian sebelumnya, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata menjelaskan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat. Pada Pasal 5 dijelaskan desa yang dapat

dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya,
- b. mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata,
- c. ada pengembangan kerajinan usaha kecil menengah yang khas dan diproduksi secara turun temurun,
- d. ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Berikut ini merupakan komponen desa wisata menurut beberapa ahli yang dirangkum dalam kajian teori sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kajian Teori Komponen Desa Wisata

No	Sumber teori	Komponen Desa Wisata
1	Gumelar (2010)	<ol style="list-style-type: none"> a. Keunikan, keaslian, sifat khas b. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa c. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya secara hakiki menarik minat pengunjung d. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.
2	Putra (2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat 2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual 3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya 4. Akseibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata 5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan
3	Prasiasa (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat lokal 2. Sistem norma setempat 3. Sistem adat setempat 4. Budaya setempat

Sumber: Zakaria, F dan Suprihardjo, R.D. (2014).

Berdasarkan perkembangannya desa wisata dibagi menjadi tiga kategori. Dalam Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau, kategori tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Desa Wisata Embrio

Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata.

b. Desa Wisata Berkembang

Desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.

c. Desa Wisata Maju

Desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Dari definisi macam-macam desa wisata diatas, maka Desa Jambewangi yang berada di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi ini termasuk kedalam kategori desa wisata berkembang karena memiliki potensi wisata yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.

2.5 Pengembangan Desa Wisata

Desa memiliki segudang potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas dan dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Potensi desa adalah sumber daya yang dimiliki desa yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah akan memengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Potensi desa juga diartikan sebagai

kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa. Potensi desa mencakup keadaan alam dan manusia yang ada di dalamnya beserta hasil-hasil kerja manusianya. Potensi desa terdiri dari potensi fisik dan potensi nonfisik yang diharapkan manfaatnya bagi kelangsungan dan perkembangan desa . Potensi desa yang meliputi potensi fisik yaitu:

a. Tanah

Tanah yang subur merupakan potensi utama desa. Tanah dapat berupa sawah, tegal, atau pekarangan. Penduduk desa mengelola dan memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

b. Air

Melimpahruahnya sumber air, selain dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari juga dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan industri air minum.

c. Iklim

Iklim sangat memengaruhi aktivitas penduduk desa yang pada umumnya bermata pencaharian petani. Kegiatan petani untuk menentukan jenis tanaman sangat bergantung pada iklim. Iklim sejuk, dingin, dan curah hujan cukup sangat mendukung kehidupan penduduk desa dalam meningkatkan hasil pertanian.

d. Flora dan fauna

Potensi flora di desa adalah masih banyak tersedianya tanaman bahan makanan pokok, seperti padi, jagung, dan ketela pohon. Adapun potensi fauna berupa hewan ternak, antara lain ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Hasil pertanian dan peternakan dapat menarik penduduk lain untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan membeli barang hasil pertanian dan peternakan.

Selain potensi fisik, terdapat juga potensi non fisik antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat Desa

Penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Penduduk desa akan mengolah potensi sumber daya yang dimiliki desanya. Suatu wilayah desa yang mempunyai jumlah penduduk banyak dengan berbagai keterampilan akan memberikan sumbangan bagi pendapatan desa tersebut.

b. Lembaga Sosial Desa

Lembaga sosial desa, seperti pendidikan, adat, koperasi, dan lembaga lainnya dapat memberikan bantuan dan mendukung kegiatan penduduk desa.

c. Aparatur Desa

Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa untuk mengantarkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna dalam mengelola pembangunan. (<http://www.ssbelajar.net/2012/12/potensi-desa-dan-perkembangan-desa-kota.html> diakses pada 17 Februari 2017)

Berangkat dari pengertian dan klasifikasi potensi tersebut. Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah salah satunya adalah dengan pengembangan desa wisata. Pengembangan pada umumnya adalah sebuah upaya yang dilakukan berdasarkan perencanaan untuk menciptakan sebuah daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan.

Suatu daya tarik wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya. Menurut Maryani (dalam Suryadana dan Octavia 2015:53), syarat-syarat tersebut adalah:

a. *What to see*

Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “*entertainment*” bagi wisatawan. *What to see* meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian, dan atraksi wisata.

b. *What to do*

Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah dan tinggal lama di tempat itu.

c. *What to buy*

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal.

d. *What to arrived*

Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ke tempat tujuan wisata tersebut.

e. *What to stay*

Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang maupun non berbintang dan sebagainya.

Dalam pengembangan desa wisata, diperlukan beberapa faktor yang akan mendukung jalannya pengembangan desa wisata. Gumelar dan Putra menyebutkan faktor-faktor pengembangan desa wisata ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pengembangan Desa Wisata

No	Sumber Teori	Pengembangan Desa Wisata
1	Gumelar (2010)	1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat. 2. Menguntungkan masyarakat setempat. 3. Berskala kecil. 4. Melibatkan masyarakat setempat. 5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.
2	Putra (2006)	1. Pariwisata terintegrasi dengan masyarakat. 2. Menawarkan berbagai atraksi khas. 3. Akomodasi berciri khas desa setempat.

Sumber: Zakaria, F dan Suprihardjo, R.D. (2014).

Sedangkan menurut Soemarno (2010:3-4), untuk mensukseskan pengembangan desa wisata diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan.

2. Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti: bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

3. Kegiatan Pemerintahan di Desa

Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti: rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

4. Promosi

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.

5. Festival/Pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bias menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan lain sebagainya.

6. Membina Organisasi Warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka.

7. Kerjasama dengan Universitas.

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

Sedangkan untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di suatu desa wisata, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut:

1. *Eco-lodge*. Renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan, atau membangun *guest house* berupa, *bamboo house*, *traditional house*, *log house*, dan lain sebagainya.
2. *Eco-recreation*. Kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa (*hiking*), *biking* di desa dan lain sebagainya.

3. *Eco-education*. Mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkungan dan mengenalkan flora dan fauna yang ada di desa yang bersangkutan.
4. *Eco-research*. Meneliti flora dan fauna yang ada di desa, dan mengembangkan produk yang dihasilkan di desa, serta meneliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa tersebut, dan sebagainya.
5. *Eco-energy*. Membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air untuk *Eco-lodge*.
6. *Eco-development*. Menanam jenis-jenis pohon yang buahnya untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain agar bertambah populasinya.
7. *Eco-promotion*. Promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan mengundang wartawan untuk meliput mempromosikan kegiatan desa wisata.

Prasiasa (2011:101-104) menyatakan bahwa, pengembangan desa wisata menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahapannya. Tujuannya adalah agar pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat tersebut berwujud pada partisipasi yang dapat dilihat dalam lima tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong pengembangan desa wisata.

2. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang diberi kepercayaan dalam pengembangan desa wisata.

3. Tahap Operasional

Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan non fisik. Partisipasi fisik dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan

pariwisata di desanya. Kedua, masyarakat menyediakan sumber-sumber penunjang seperti bangunan. Sedangkan partisipasi non fisik juga dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat dengan penuh kesadaran mempelajari bahasa asing. Kedua, masyarakat mempelajari pariwisata pada lembaga pendidikan formal.

4. Tahap Pengembangan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan, antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pengelolaan usaha penginapa, usaha kerajinan, usaha warung makanan dan minuman, dll.

5. Tahap Pengawasan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif untuk mencegah agar desanya tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif.

Partisipasi masyarakat tersebut dirangkum ke dalam suatu organisasi pengelolaan desa wisata agar dapat berjalan dengan terstruktur. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Bab VI Pasal 11 Tentang Desa Wisata, organisasi pengelolaan desa wisata antara lain sebagai berikut.

- (1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
- (6) Pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal ini, pemerintah desa menjadikan regulasi sebagai legalisasi dalam struktur organisasi pengelola, yaitu sebagai pelindung terhadap jalannya pengembangan desa wisata. Masuknya unsur pemerintah desa dalam struktur organisasi pengelola desa wisata juga merupakan suatu cara atau teknik yang dikembangkan untuk tetap ikut dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang tujuan utamanya juga untuk pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Di Kabupaten Banyuwangi, pengembangan desa wisata ini mempunyai tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Bab VI Pasal 3 Tentang Desa Wisata antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonversi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
- d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat.
- e. Mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia.
- f. Menumbuhkan kebanggaan adat, budaya dan desanya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

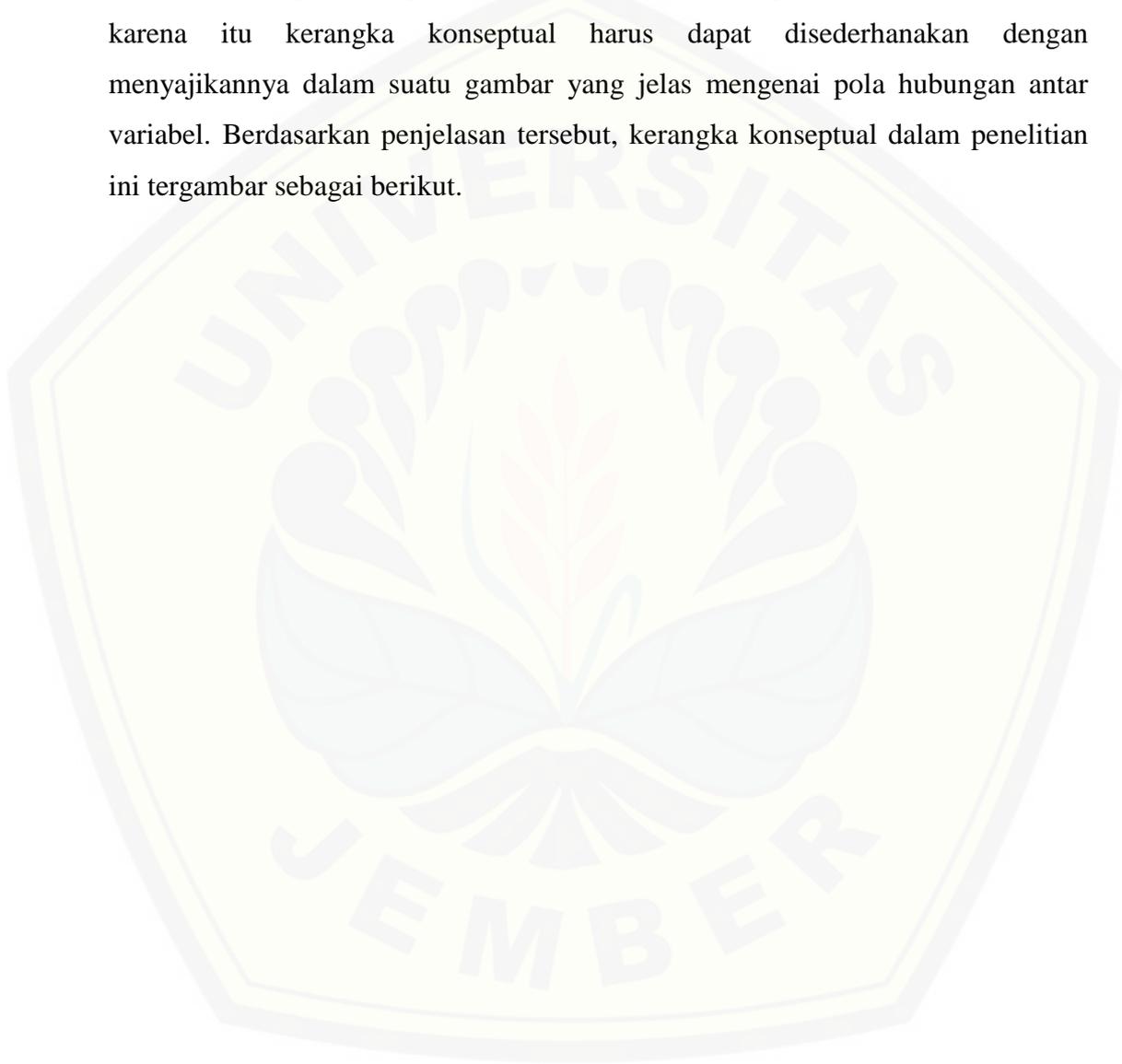
Judul Penelitian	Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011	Strategi <i>Capacity Building</i> Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)	Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Area Branca Metiaut, Dili	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Desa Wisata pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang
Tahun	2012	2015	2015	2017	2017
Penulis	Ryando Permana Putra dan Dra. Wan Asrida, M.Si	Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, dan Heru Ribawanto	Wike Tri Damayu	Zeferino Martins, Syamsul Alam Paturusi, dan Ida Bagus Ketut Surya	Ahmad Zainul Arifin
Rumusan Masalah	Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011?	Bagaimana strategi <i>capacity building</i> Pemerintah Desa Bendosari dalam pengembangan Kampong Ekowisata berbasis masyarakat lokal?	Bagaimana Peran Pemerintahan Desa dalam Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?	Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata di Area Branca Desa Metiaut, Dili?	Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang?
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Peran Pemerintah Desa mencakup tiga hal penting yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan, dilakukan oleh masyarakat Buluh Cina itu sendiri. 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mempercepat kemajuan objek wisata. 3. Sistem promosi melalui pemasangan iklan pada media cetak dan media elektronik. 	<p>Strategi <i>capacity building</i> pemerintah desa antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang meliputi; membangun SDM melalui sosialisasi, pendidikan, pembentukan pemandu wisata dan pemberdayaan masyarakat. 2. Strategi penguatan organisasi meliputi; perbaikan struktur dan tugas pemerintah desa, peningkatan sarana dan prasarana kerja, dan membina organisasi masyarakat lokal. 3. Strategi reformasi kelembagaan 	<p>Peran pemerintah desa terdiri atas faktor-faktor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan: pemerintah desa membuat kebijakan, melakukan pembentukan kelompok sadar wisata, promosi, dan kerjasama. 2. pengorganisasian: pemerintah desa melakukan pembagian tugas kelompok sadar wisata yang dinamaka wisata dharma B29. 3. penggerakan: pemerintah desa menggerakkan masyarakat Argosari untuk terlibat dalam mendukung pengelolaan 	<p>1. Peran pemerintah dalam membuat regulasi seperti undang-undang kepariwisataan dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan wisatawan.</p> <p>2. Peran pemerintah menyediakan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung untuk menarik perhatian wisatawan.</p> <p>3. Peran pemerintah membuat perencanaan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai yang diinginkan.</p> <p>4. Peran pemerintah melakukan pengawasan untuk mengontrol pekerjaan dengan efektif.</p>	<p>Peran pemerintah daerah antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi pada masyarakat terkait pengembangan objek wisata. 2. Adanya kerjasama dan hubungan baik yang dibina oleh Dinas Pariwisata dengan masyarakat dan pihak travel. 3. Adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan. 4. Perbaikan kualitas sumber daya manusia pada instansi Pemerintah Desa maupun Dinas Pariwisata.
-------------------------	--	--	--	--	--

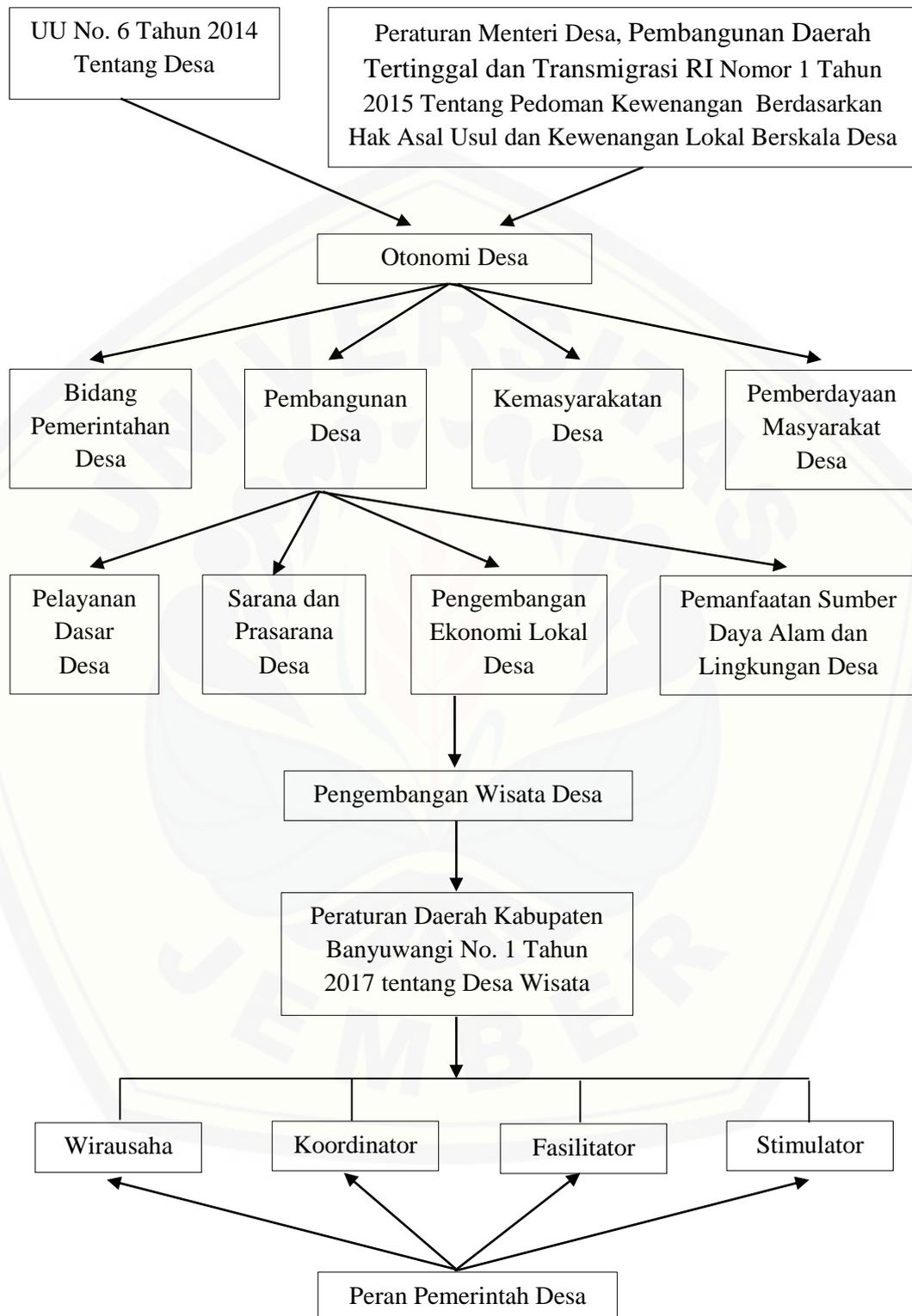
		meliputi; perbaikan kebijakan pemerintah desa dan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lain untuk mencapai pengembangan ekowisata.	pariwisata B29. 4. pengawasan: pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi.		
Persamaan dengan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian b. Fokus penelitian pada peran pemerintah desa c. Objek penelitian pengembangan desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian b. Objek penelitian pengembangan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian b. Fokus penelitian pada peran pemerintah desa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian b. Objek penelitian pengembangan desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian b. Objek penelitian pengembangan desa wisata
Perbedaan dengan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Konsep penelitian c. Hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Fokus penelitian pada strategi pemerintah desa c. Konsep penelitian d. Hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Konsep penelitian c. Objek penelitian pengelolaan objek wisata d. Hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Fokus penelitian pada peran pemerintah daerah c. Konsep penelitian d. Hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Konsep penelitian c. Fokus penelitian pada peran pemerintah daerah d. Hasil penelitian

2.6 Kerangka Konseptual

Amirullah (2013:39) menyatakan bahwa, agar kerangka konseptual dapat dipahami dan diterima oleh pembaca, maka sebaiknya suatu kajian berfikir haruslah dibuat oleh peneliti itu sendiri (bukan buatan orang lain), yaitu dengan memberikan argumen-argumen berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu kerangka konseptual harus dapat disederhanakan dengan menyajikannya dalam suatu gambar yang jelas mengenai pola hubungan antar variabel. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka konseptual dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Moenandir (2011:31), metode adalah ilmu yang mempelajari cara untuk mendapatkan informasi berupa data. Sedangkan Suratmo (2002:1) menjelaskan penelitian sebagai proses untuk mengetahui hal-hal yang berada di sekitarnya, dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dipikirkannya, yang dimulai dengan pertanyaan apa itu? dan mengapa demikian? Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian.
2. Tempat dan Waktu Penelitian.
3. Situasi Sosial.
4. Desain Penelitian.
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.
6. Teknik Menguji Keabsahan Data.
7. Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Bungin (2012:18) menyatakan bahwa, memilih pendekatan dalam kegiatan penelitian harus disadari bahwa ia memiliki konsekuensi tersendiri sebagai sebuah proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau, dan maksud dari pendekatan tersebut. Untuk memahami fenomena sosial tampaknya memang perlu suatu pendekatan tersendiri, dan itulah yang ditawarkan oleh pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Amirullah (2013:61), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran. Sedangkan Sanjaya (2013:41) menyatakan bahwa, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif, perbedaan tersebut terletak bukan hanya pada jenis data yang dikumpulkannya tetapi juga bagaimana proses pengumpulan datanya.

Sugiyono (2011:15) menyatakan, bahwa:

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanjaya (2013:47), metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada bagian ini dipaparkan dimana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Menurut Usman dan Akbar (2009:41), tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2017 dan memilih Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Desa Jambewangi berbeda dengan desa wisata lain di Banyuwangi yang hanya menawarkan salah satu daya tarik wisata. Desa Jambewangi menyuguhkan beraneka ragam daya tarik wisata meliputi wisata edukasi, wisata alam, wisata buatan, agrowisata, serta pasar wisata. Namun dalam pengembangannya terjadi kesenjangan antara kelompok kerja destinasi wisata dengan Pemerintah Desa Jambewangi sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata.

3.3 Situasi Sosial

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52), sub bagian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

3.3.2 Pelaku

Informan kunci atau subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi, menguasai, memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pelaku atau informan yang akan terlibat antara lain yaitu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Jambewangi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kelompok kerja wisata, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata.

3.3.3 Aktivitas

Aktivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Desain Penelitian

Menurut Amirullah (2013:8), desain penelitian merupakan kerangka atau rencana dasar yang membimbing pengumpulan data dan tahapan analisis dari proyek riset. Sedangkan menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:51), desain penelitian ini menetapkan peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor

(1993:30) merupakan pendekatan yang mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik (utuh). Jadi pokok kajiannya baik sebuah organisasi atau individu tidak akan disederhanakan kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesa yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Berbeda dengan pendekatan kualitatif, Sanjaya (2013:34) menjelaskan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan yang data dan analisisnya bersandarkan pada perhitungan statistik. Untuk memahami penelitian ini maka pertama kali harus memahami landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif. Menurut Nawawi dan Martini (1996:73), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan Soeharto (1993:45) menyatakan bahwa, metode deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan termasuk di dalamnya beberapa hal ini:

- a) studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu,
- b) studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimumkan reliabilitas.

3.4.1 Fokus Penelitian

Penjelasan mengenai pendekatan dan metode diatas sejalan dengan fokus penelitian ini yang ingin menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Menurut Amirullah (2013:115), data adalah sejumlah informasi-informasi yang menjelaskan mengenai karakteristik dari suatu objek (orang dan benda)

untuk keperluan penelitian. Sedangkan menurut Arikunto (2006:129), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Walaupun terdapat sejumlah klasifikasi data yang dilakukan oleh para ahli, namun secara umum data yang tersedia bagi seorang peneliti dapat dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Amirullah (2013:116) menyatakan bahwa, data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Perbedaan antara kedua jenis data tersebut dapat ditinjau berdasarkan pada empat kriteria yaitu, a) tujuan pengumpulan data, b) proses pengumpulan data, c) biaya yang dibutuhkan, dan d) waktu.

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu terkait dengan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur, penelitian terdahulu, dan dokumentasi terkait dengan topik yang diteliti.

3.4.3 Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221), seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan.
- b. Berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti.
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai.

- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Herdiansyah (2015:177) menyatakan bahwa, dalam teknik *purposive sampling* subjek penelitian yang dipilih haruslah memiliki keterikatan dengan tujuan penelitian. Walaupun tidak ada keharusan bahwa dalam melakukan penelitian kualitatif, subjek dipilih dengan menggunakan teknik ini, tetapi setidaknya teknik tersebut sesuai dengan karakter dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan dengan pertimbangan bahwa informan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah penelitian. Informan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kepala Desa Jambewangi, Bapak Suprayitno.
2. Sekertaris Desa Jambewangi, Bapak Mustaji.
3. Kepala Bagian Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Bapak M. Rofiq.
4. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Jambewangi, Bapak M. Kodir.
5. Ketua Badan Usaha Milik Desa, Bapak Warijan.
6. Sekertaris Badan Usaha Milik Desa, Bapak Aris.
7. Ketua Kelompok Kerja Pengurus Watu Gedhek, Bapak Chairul Anwar.
8. Ketua Kelompok Kerja Pengurus Lapak Kreatif, Bapak Mismanto.
9. Ketua Kelompok Kerja Pengurus Jambewangi Jungle Lodge, Bapak Darselo.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Amirullah (2013:115), setelah peneliti menetapkan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam proses penelitian, maka langkah berikutnya adalah memperoleh data dari orang-orang (responden) yang telah ditetapkan sebagai sampel tersebut. Sedangkan Arikunto (2006:222) menyatakan bahwa, menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, namun mengumpulkan data jauh lebih penting lagi terutama apabila peneliti

menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti.

3.5.1 Observasi

Amirullah (2013:123) menyatakan bahwa, dalam pengertian yang sederhana observasi meliputi kegiatan pencatatan pada perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Sanjaya (2013:270), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Metode observasi dapat dilakukan sebagai berikut.

- a) *Observasi terstruktur dan tidak terstruktur.* Dalam observasi terstruktur peneliti menetapkan secara rinci apa yang akan diobservasi dan bagaimana pengukuran akan dicatat, sedangkan observasi tidak terstruktur peneliti memonitor seluruh fenomena yang relevan tanpa penetapan rincian terlebih dahulu.
- b) *Observasi tersembunyi dan terang-terangan.* Dalam observasi tersembunyi responden tidak sadar bahwa mereka sedang diamati, sedangkan observasi terang-terangan responden sengaja diberitahu bahwa mereka sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode observasi terang-terangan dimana peneliti memperlihatkan diri mereka agar nampak oleh responden yang akan diamati dan berterus terang kepada responden terhadap maksud dan tujuan untuk meneliti.

3.5.2 Dokumentasi

Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa, metode dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam metode ini yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati sehingga

untuk menggunakan metode ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Sedangkan Herdiansyah (2015:245) menyatakan bahwa, dokumentasi pada umumnya digunakan sebagai instrumen tambahan saja yang sifatnya memperkuat atau menambah reliabilitas dari instrumen utama yaitu observasi dan wawancara. Bentuk dokumentasi yang bisa digunakan oleh peneliti yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3.5.3 Wawancara

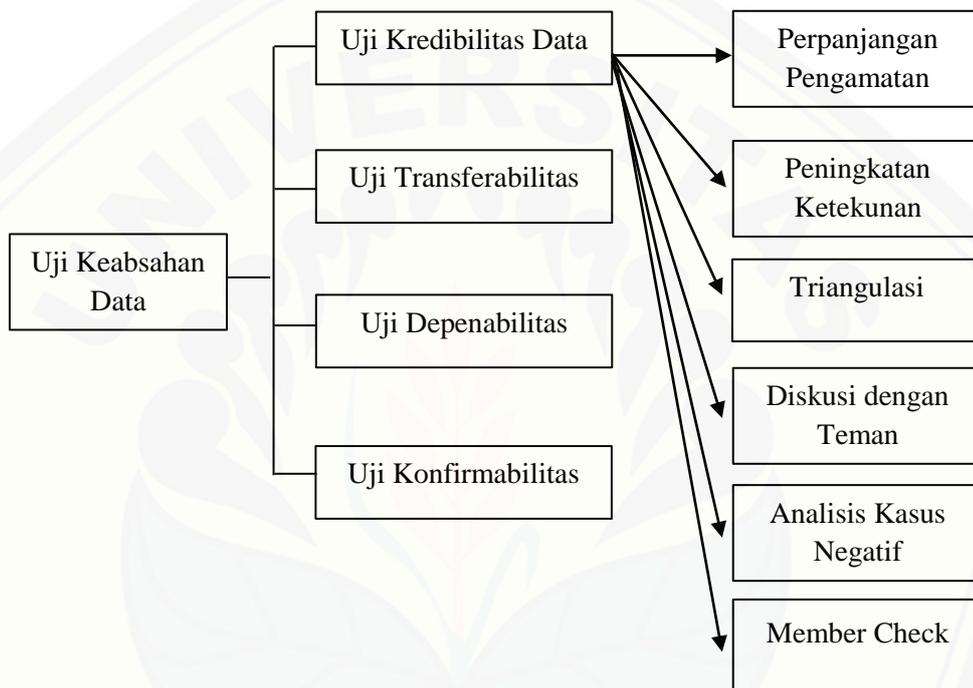
Menurut Sanjaya (2013:263), wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Menurut Herdiansyah (2015:189), wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya pada umumnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

- a) wawancara terstruktur, wawancara bentuk ini sangat terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangat minim. Selama proses wawancara harus sesuai mungkin dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan,
- b) wawancara semi terstruktur, merupakan wawancara yang relatif aman dan mudah digunakan terutama digunakan oleh peneliti pemula dengan metode kualitatif. Dengan wawancara semi terstruktur maka secara teoritis masih terikat dengan konsep teori yang digunakan, sementara dalam menyusun pertanyaan, peneliti dibebaskan dalam melakukan eksplorasi namun tetap berkaitan dengan dimensi teori yang diteliti,
- c) wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang tidak terikat dengan kerangka teoritis sehingga apa yang ditanyakan merupakan pertanyaan dengan tema besarnya saja dan pertanyaan yang diajukan dapat meluas dan membebaskan peneliti untuk bertanya apapun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena karakteristik dari wawancara semi terstruktur sangat sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat fleksibel, setting natural, dan menekankan pada kedalaman bahasa.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Gambar 3.1 Uji Keabsahan Data



Sumber: Sugiyono (2010) dalam Rokhmah dkk. (2014:56)

Dari beberapa macam pilihan teknik diatas, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam menguji keabsahan data antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan Ketekunan

Fatchan (dalam Rokhmah dkk. 2014:58) mengemukakan bahwa melakukan pengamatan dengan tekun dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, sehingga penyelidikan lebih dapat dipusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, maupun dokumentasi-dokumentasi yang terkait

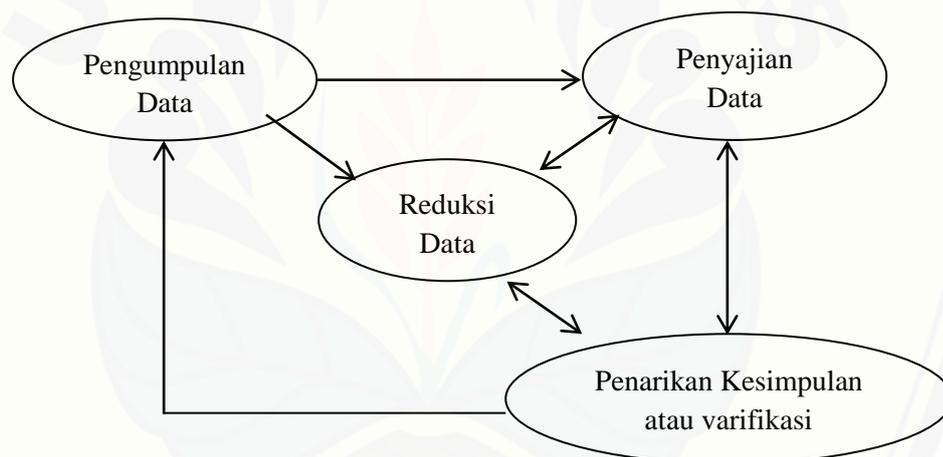
dengan temuan yang diteliti bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ketekunan.

2. Triangulasi

Menurut Mukhtar (dalam Rokhmah dkk. 2014:58), triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data) atau dengan istilah lain dikenal dengan “*trustworthiness*” dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

6.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Gambar 3.2 Komponen Analisis Data



Sumber: Bungin (2012:69)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpul data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatan-muatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

b. Reduksi data

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Menurut Herdiansyah (2015:264), inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

c. Penyajian Data

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Menurut Herdiansyah (2015:276), penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

d. Penarikan Kesimpulan

Herdiansyah (2015:279) menyatakan bahwa, kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2000:87), verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta pembahasannya. Dari hasil pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa melakukan perannya dengan melakukan berbagai usaha dalam pengembangan desa wisata yaitu sebagai berikut.

1. Wirausaha

Pemerintah Desa memanfaatkan potensi Desa Jambewangi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.

2. Koordinator

- a) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Jambewangi.

- b) Perumusan pengembangan desa wisata ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

- c) Implementasi bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk unit pengembangan usahanya yaitu desa wisata.

3. Fasilitator

- a) Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat.

- b) Penunjukan kelompok kerja pengurus wisata.

- c) Penetapan Peraturan Desa Jambewangi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Pokdarwis” Desa Jambewangi.

4. Stimulator

- a) Promosi melalui Festival Naga Berbunga, Kegiatan Pemerintahan, dan Sosial Media.

- b) Inovasi pengembangan destinasi wisata.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ini, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Jambewangi dalam pengembangan desa wisata, antara lain sebagai berikut.

1. Bantuan keuangan dari BUMDesa untuk unit wisata kedepannya dapat dialokasikan secara adil dan merata, sehingga mengurangi resiko kesenjangan pada destinasi wisata satu dengan lainnya.
2. Penetapan Surat Keputusan (SK) untuk Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing destinasi wisata agar kinerjanya dilindungi oleh landasan hukum.
3. Perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagi masing-masing organisasi yang terlibat dalam pengembangan desa wisata sebagai landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi.
4. Penyediaan informasi tentang destinasi wisata Desa Jambewangi sebagai promosi dengan memanfaatkan tempat yang sering dikunjungi masyarakat, seperti di Stasiun Kereta Api Kalisetail, di Kantor Desa Jambewangi maupun di tempat-tempat strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen: Disertai Contoh Judul Penelitian dan Proposal*. Malang: Bayumedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1993. *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
- Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kanisius. 2001. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2011. *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rozaki, Abdur, dan Resti Rinandra. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi: Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.

- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soeharto, Bohar. 1993. *Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi, Format, Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Thesis) Ilmu Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soekadji, R.G. 1997. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage")*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarno. 2011. *Desa Wisata*. Malang: PP SUB
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU NO. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suratmo, Gunarwan. 2002. *Panduan Penelitian Multidisiplin*. Institut Pertanian Bogor Press.
- Suryadana, Liga dan Vanny Octavia. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Suyitno. 2001. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Widjaja, Haw. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Buku Terbitan Lembaga

- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Januar, Jani. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Konsep, dan Implementasi*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press.

- Setyawan, Dodiet Aditya. 2013. *Hand Out Metodologi Penelitian*. Poltekkes Surakarta.
- Simanungkalit, dkk. 2012. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Universitas Jember. 2014. *Diktat Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jember: University Press.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: University Press.

Jurnal

- Damayanti, E., M. S. Soeaidy, dan H. Ribawanto. 2015. Strategi *Capacity Building* Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(3): 464-470.
- Martins, Z., S. A. Paturusi, dan I. B. K. Surya. 2017. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Area Branca Metiaut, Dili. *JUMPA*. 3(2): 372-386.
- Zakaria, Faris dan R. D. Suprihardjo. 2014. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits*. 3(2): 245-249.

Skripsi

- Arifin, Ahmad Z. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang*. Tanjungpinang: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Damayu, Wike T. 2015. *Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*. Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata.

Peraturan Desa Jambewangi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambewangi Tahun 2017.

Peraturan Desa Jambewangi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Peraturan Desa Jambewangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Pokdarwis” Desa Jambewangi.

Internet

CNN Indonesia. 2017. Kemenpar Luncurkan 10 Destinasi Wisata Branding. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170616163301-307-222304/kemenpar-luncurkan-10-destinasi-wisata-branding/>. [Diakses pada 11 Agustus 2017].

Putra, R. P., dan W. Asrida. 2012. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011.

<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5064/JURNAL%20RIANDO.pdf?sequence=1>. [Diakses pada 20 Agustus 2017].

Wardani, D. M., 2016. Ribuan Pengunjung Padati festival Naga Berbunga. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ribuan-pengunjung-padati-festival-naga-berbunga>. [Diakses pada 5 Maret 2017].

Susilo, Tunggul. 2014. Kearifan Lokal Senagai Daya Tarik Pariwisata Banyuwangi. www.antarajatim.com/lihat/berta/131259/kearifan-lokal-sebagai-daya-tarik-pariwisata-banyuwangi. [Diakses pada 20 Agustus 2017].